

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan Dalam Penerapan *E-government* belum bisa dikatakan siap, hal tersebut dapat dilihat dari dimensi :

1. Infrastruktur Telekomunikasi, Desa Muaro Pijoan memiliki perangkat komputer dan laptop dengan spesifikasi standar serta akses internet yang relatif memadai. Namun, kualitas infrastruktur telekomunikasinya masih sebatas memenuhi kebutuhan dasar, belum didukung oleh perangkat dengan spesifikasi bagus atau server khusus yang dapat menunjang sistem pelayanan digital , bahkan laptop Sekdesnya Lenovo yang sudah lemot akibat sudah lama. Dengan demikian, infrastruktur telekomunikasi desa baru berada pada tahap awal dan belum optimal untuk mendukung implementasi *e-government* secara menyeluruh.
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi, Desa Muaro Pijoan sudah memiliki koneksi internet yang cukup stabil sehingga bisa diakses oleh aparatur untuk bekerja. Namun, pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas. *Website OpenSID* yang dimiliki desa lebih banyak digunakan untuk menampilkan profil desa dan informasi dasar, belum dipakai untuk pelayanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan, pengaduan online, atau penyampaian informasi publik yang lebih interaktif. Akibatnya, konektivitas yang ada belum benar-benar memberikan dampak signifikan pada pelayanan publik.
3. Sumber Daya Manusia Pemerintah, Aparatur desa Muaro Pijoan umumnya memiliki latar belakang pendidikan non-teknologi informasi. Walaupun sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan dari pemerintah kabupaten maupun perguruan tinggi (misalnya terkait *OpenSID*), kemampuan yang diperoleh belum merata dan belum benar-benar terinternalisasi dalam rutinitas kerja. Aparatur desa cenderung lebih nyaman melayani masyarakat secara manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM masih menjadi salah satu faktor penghambat penerapan *e-government* di Desa Muaro Pijoan.

4. Ketersediaan Dana dan Anggaran, setiap tahun desa memperoleh dana desa, tetapi belum ada alokasi anggaran yang spesifik atau khusus untuk pengembangan *e-government*. Prioritas penggunaan anggaran masih dominan pada pembangunan fisik dan kebutuhan administrasi rutin. Akibatnya, sistem yang sudah ada (*OpenSID*) tidak dikembangkan lebih jauh dan tidak memiliki dukungan biaya operasional yang memadai.
5. Perangkat Hukum, hingga saat ini, Desa Muaro Pijoan belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau regulasi lain yang secara khusus mengatur tentang implementasi *e-government*. Ketiadaan aturan ini menyebabkan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik belum memiliki landasan yang kuat. Aparatur desa belum memiliki pedoman yang jelas dalam pengelolaan data digital maupun mekanisme pelayanan online, sehingga penerapan *e-government* tidak berjalan sebagai prioritas.
6. Perubahan Paradigma. aparatur dan masyarakat Desa Muaro Pijoan masih lebih terbiasa dengan pelayanan tatap muka secara langsung di kantor desa. Walaupun sebagian aparatur memahami bahwa *e-government* dapat memberikan manfaat berupa efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses, namun paradigma pelayanan digital belum benar-benar terbentuk. Masyarakat pun lebih nyaman datang langsung, sehingga belum ada dorongan yang kuat untuk memanfaatkan layanan berbasis teknologi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Muaro Pijoan sebaiknya mengadakan pelatihan khusus dan terjadwal untuk seluruh staf atau aparatur desa dalam mengoperasikan *OpenSID* misalnya belajar untuk mengaktifkan fitur pelayanan publik pada *OpenSID*, yaitu layanan surat menyurat secara online. Hal ini agar aparatur desa terbiasa mengoperasikan sistem, serta masyarakat terdorong untuk menggunakannya.
2. Kantor Desa Muaro Pijoan sebaiknya memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) implementasi *OpenSID* secara tertulis sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam memberikan pelayanan, sekaligus sebagai acuan bagi masyarakat untuk memahami prosedur pelaksanaan *e-government*

sehingga mereka dapat memperoleh layanan yang lebih transparan, cepat, dan terstandar.